

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH*
TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI
LEMBAGA PENAMPUNG ASPIRASI
DAERAH**
(Studi di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung)

SKRIPSI

**MEGA INDAH SARI
NPM : 1921020378**



Progam Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syarr'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/2024 M**

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN *FIQH SIYASAH*
TERHADAP OPTIMALISASI KINERJA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH (DPD) SEBAGAI
LEMBAGA PENAMPUNG ASPIRASI
DAERAH**

(Studi di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah



Oleh :
MEGA INDAH SARI
NPM : 1921020378

Pembimbing 1 : Dr. Iskandar Syukur, M.A.
Pembimbing 2 : Muslim, M.HI.

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1446 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	‘
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su'ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Indonesia menciptakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga legislatif dalam tingkat Daerah, bertujuan untuk dapat menjadi wadah dalam menampung aspirasi dalam lingkup yang lebih kecil yakni Propinsi. Namun setiap proses dalam menjalankan amanat UU tentunya akan terdapat beberapa masalah yang menyebabkan kurang maksimalnya kinerja DPD dalam menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yakni Bagaimana Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah, serta Bagaimana Analisis Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah. Tujuan dalam penulisan skripsi ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan gelar Sarjana yaitu untuk mengetahui optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai lembaga penampung aspirasi daerah dan untuk mengetahui analisis fiqh siyasah terhadap optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga aspirasi daerah.

Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penulis ingin menyampaikan dengan cara menggambarkan dan mendeskripsikan suatu permasalahan yang ada di lapangan. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan atau Field Research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat secara dekat objek yang akan diteliti. Sehingga data yang digunakan adalah primer yang bersumber langsung dari data lapangan, serta data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal, skripsi dan pendapat para ahli.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Propinsi Lampung telah dilaksanakan dengan maksimal walaupun masih terdapat faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengoptimalisasian kinerja DPD yaitu keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, serta pengetahuan teknologi. Kemudian Tinjauan fiqh siyasah terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Propinsi Lampung, merupakan bentuk representatif dari Ahlal hal liwal aqd yang merupakan tokoh lembaga legislatif dalam pandangan fiqh siyasah, yang mana memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam menjalankan roda kenegaraan untuk kemaslahatan masyarakat.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Aspirasi, Fiqh Siyasah

ABSTRACT

Indonesia created the Regional Representative Council (DPD) as a legislative institution at the regional level, aiming to be a forum for accommodating aspirations in a smaller scope, namely the province. However, every process in carrying out the mandate of the law will certainly have several problems that cause the DPD's performance to be less than optimal in accommodating and channeling community aspirations in various regions. The formulation of the problem in this thesis is How to Optimize the Performance of the Regional Representative Council (DPD) as an Institution for Accommodating Regional Aspirations, and How to Analyze Positive Law and Fiqh Siyasah Against Optimizing the Performance of the Regional Representative Council (DPD) as an Institution for Accommodating Regional Aspirations. The purpose of writing this thesis, in addition to fulfilling the requirements for completing a bachelor's degree, is to determine the optimization of the Regional Representative Council (DPD) as an institution for accommodating regional aspirations and to determine the analysis of fiqh siyasah towards optimizing the Regional Representative Council (DPD) as an institution for accommodating regional aspirations.

This research uses a qualitative method because the author wants to convey by describing a problem in the field. The type of this research is field research, namely research that is carried out by looking closely at the object to be studied. So the data used is primary data that comes directly from field data as well as secondary data, namely supporting data from sources in the form of books, journals, theses, and expert opinions.

Based on the results of the research conducted, it can be concluded that the optimization of the performance of the Regional Representative Council (DPD) as an institution for accommodating regional aspirations in Lampung Province has been carried out optimally, although there are still inhibiting factors that are obstacles in optimizing the performance of the DPD, namely limited regulations, human resources, and technological knowledge. Then the Review of Fiqh Siyasah on the Optimization of the Performance of the Regional Representative Council (DPD) as an Institution for Accommodating Regional Aspirations in Lampung Province is a representative form of Ahlal hal liwal aqd, who are legislative figures in the view of Fiqh Siyasah, which have the same duties and authorities in running the wheels of state for the benefit of society.

Keywords: Regional Representative Council, Aspirations, Fiqh Siyasah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Indah Sari

NPM : 1921020378

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah (Studi di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain, kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

2024

Penulis



Mega Indah Sari
1921020378



**KEMENTRIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah (Studi di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung)

Nama : Mega Indah Sari

NPM : 1921020378

Program Studi: Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A.
NIP. 1966033019920329002

Muslim, M.HI.
NIP. 198505082023211019

Ketua
Program Studi Hukum Tata Negara

Frenki, M.Si.
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin I Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Positif dan Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah (Studi di Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung)**” disusun oleh **Mega Indah Sari**, NPM: **1921020378**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah)**, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Kamis, 13 Juni 2024.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I (.....)

Sekretaris : Erik Rahman Gumiri, M.H. (.....)

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji II : Dr. Iskandar Syukur, M.A. (.....)

Penguji III : Muslim, S.H.I., M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(QS. An-Nisa' 58 [4])



PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan hidayahNyayang telah memberikan kesabaran, kesehatan, serta kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam selama proses pengerjaannya serta kontribusi nya kepada:

1. Teruntuk ibuku tercinta, tersayang, dan terkasih, Ibu Ningsih yang menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagiku, selalu senantiasa mendoakanku tanpa terputus, selalu mengingatkan supaya tidak lupa kepada Allah swt di setiap langkahku, terima kasih ku ucapkan kepada ibuku atas dukungannya dari awal perjalanan hidupku hingga sampai sekarang bisa. Dan terima kasih kepada M. Yusuf selaku ayah.
2. Teruntuk Tio, dan Ani selaku kakak-kakak ku, penulis ingin mengucapkan terima kasih atas segala sesuatu yang sudah diberikan dalam bentuk apapun, sebagai adik bungsu penulis sangat bersyukur telah diberikan kakak-kakak seperti kalian di hidupku.

RIWAYAT HIDUP

Mega Indah Sari lahir di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 01 November 2000, lahir dari pasangan M. Yusuf dan Ningsih. Merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara, yakni Nugroho Dintio dan Seli Septiani. Ketika 2007 penulis masuk Sekolah Dasar Negeri 1 Jagabaya 3. Kemudian lulus pada tahun 2012. Selanjutnya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian, masuk ke Sekolah Menengah Atas di SMA N 12 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2018.

Selanjutnya pada tahun 2019 diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di jurusan Hukum Tata Negara sebagai pilihan pertama untuk dapat menimba ilmu serta mendapatkan relasi, pengalaman, dan pengetahuan.



Mega Indah Sari
1921020378

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah (Studi di Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Lampung)”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terwujud berkat bantuan arahan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D beserta staf jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Frenki, M.Si. dan jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Dr. Iskandar Syukur., M.A selaku pembimbing I, dan Bapak Muslim, M.HI selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran dan kritikan kepada penulis di setiap proses penyusunan skripsi;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan segenap *civitas* akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
6. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan menimba ilmu dan akan selalu ku jaga nama baiknya.

7. Tempat penelitian DPD RI Provinsi Lampung, khususnya Bapak Syahril selaku Kasubbag Kepegawaian, dan Bapak Gino selaku Kepala Kantor yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi dan bimbingannya;
8. Masyarakat, baik yang menyampaikan aspirasi di DPD RI Provinsi Lampung maupun tidak yang telah bersedia menjadi narasumber dan melengkapi penelitian ini;
9. Teman-teman seperjuangan Agita Juliana, Andre Yuda Erlangga, Ika Aria Asthari, Khumaidi Irsyad, Melisa Ika Putri, dan Pebi Wulandari yang senantiasa memberi masukan serta motivasi untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi ini;
10. Teman-teman dari semasa SMA, Alisha Novelline, Aufa Riska Nabila, Erika Tri Handayani, Yuli Ayu Lestari yang selalu menghibur dalam keadaan sedih, dan rumit walaupun membuat penulis menyebut istigfar di setiap pertemuan;
11. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for, for never quitting, I wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah swt membalas semua amal kebaikan kita semua. Amin

Bandar Lampung, 2024

Mega Indah Sari
1921020378

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyash Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD).....	13
1. Pengertian <i>Fiqh Siyash</i>	13
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyash</i>	16
B. Hukum Positif Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah	17
1. Pengertian Dewan Perwakilan Daerah.....	17
2. Fungsi dan Tujuan Pendirian Dewan Perwakilan Daerah.....	24

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Lampung.....	33
--	----

1. Latar Belakang.....	33
2. Tatib/Kode Etik DPD.....	34
3. Hak Dan Kewajiban Anggota DPD	35
4. Fungsi, Tugas, dan Wewenang	37
5. Tugas dan Wewenang DPD RI.....	38
6. Visi & Misi DPD RI Provinsi Lampung.....	39
7. Anggota DPD RI Provinsi Lampung	40
B. Penyajian Data dan Fakta Penelitian	42
1. Alat Kelengkapan	44
2. Mekanisme Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah(DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah.....	47
3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Menampung Aspirasi Masyarakat	51
a. Keterbatasan Regulasi	52
b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia.....	52
c. Keterbatasan Pengetahuan Teknologi.....	53

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah	57
B. Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah	60

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR RUJUKAN LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasa* Terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah (Studi Kasus Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Lampung)” demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menguraikan secara singkat istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹

2. Hukum Positif

Hukum positif (*ius constitutum*) adalah hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

3. *Fiqh Siyasa*

Fiqh Siyasa merupakan *tarqib'idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu *Fiqh* dan *Al-Siyasih*. Secara etimologi Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.² *Siyasa* juga berarti pemerintahan dan politik, atau

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 590.

² Rindy Mustika dan Hervin Yoki Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyasa,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.

menuntut kebijakan.³ *Siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi *Siyasah* menurut Bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan pemerintah dan politik. Artinya mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai tujuan.

4. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal. Optimalisasi berarti pengoptimalan.⁴ Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak slalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.⁵

5. Penampung Aspirasi Daerah

Aspirasi masyarakat sangat penting dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi.⁶ Penerapan sistem demokrasi di suatu Negara selalu terikat dengan penerapan Trias Politika dengan membagi kekuasaan Negara menjadi tiga kekuasaan yaitu: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut secara jelas berdasarkan hak dan tanggung jawabnya. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat memiliki fungsi diantaranya adalah menampung aspirasi masyarakat dan

³Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat* (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977), 4–5.

⁴Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Gita Media Press, 2015), 562.

⁵Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 4.

⁶Regy Hilman Pahlawan, "Jurnal Civic Hukum" 4, Nomor 2 (November 2019): 147–54.

mengimplikasikan aspirasi tersebut dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, kekuasaan eksekutif bertugas untuk menjalankan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, kekuasaan yudikatif bertugas sebagai pengawas sekaligus pengadil dalam penerapan pemerintahan. Lembaga legislatif sebagai penampung aspirasi masyarakat sekaligus pembuat peraturan perundang-undangan merupakan lembaga yang sangat penting dalam Negara yang menganut sistem demokrasi. Secara umum, tugas dan fungsi lembaga legislatif salah satunya adalah menampung aspirasi masyarakat. Metode penyerapan aspirasi tidak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penegasan judul di atas maka dapat dipahami maksud judul skripsi ini adalah menganalisis atau menguraikan bagaimana pengoptimalisasian terhadap kinerja Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dalam menjalankan perannya yakni penampung aspirasi di lingkup Daerah berdasarkan pandangan *Fiqh Siyasa*.

B. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dilaksanakannya pembangunan nasional, yang hakikatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan batiniah yang berlandaskan Pancasila. Negara mempunyai tugas pokok dalam pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan (*Property*) dan keamanan (*Securiti*).⁷

Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketatanegaraan Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga tinggi negara yaitu; Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan wakil presiden, Dewan

⁷Widarta, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Papers Pustaka Utama, 2001), 80.

Pertimbangan Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Pasca amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia lembaga-lembaga tinggi negara ini mengalami perubahan, penghapusan dan penambahan lembaga tinggi negara lainnya.

Lahirnya DPD dilatarbelakangi oleh semangat para pemuda dan rakyat Indonesia untuk mereformasi UUD NRI Tahun 1945. Tuntutan reformasi tersebut akhirnya juga berkenaan dengan sistem perwakilan, yaitu agar Utusan Daerah dalam MPR diwujudkan dalam bentuk Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah. Keinginan dan tuntutan adanya DPD tersebut ditanggapi oleh MPR, yaitu dibicarakannya masalah tersebut dalam Panitia Ad Hoc I, Badan Pekerja MPR.⁸

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai arti penting yaitu sebagai wakil rakyat yang ada di daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yakni Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rencana Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Peranan Dewan Perwakilan Daerah yang menyalurkan aspirasi masyarakat sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Aspirasi yang ditampung oleh Dewan Perwakilan Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Hal ini berarti Negara Indonesia menggunakan *systembicameral*.

Dari ketentuan UUD 1945 tersebut ada 4 hal yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, yaitu:⁹

⁸King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 18.

⁹Oka Mahendra, *Menguak Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan* (Jakarta: Pustaka Sinar, 1996), 123.

1. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Pancasila.
2. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan berdasar sistem permusyawaratan perwakilan.
3. MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan yang ada di tangan rakyat.
4. MPR sebagai penyelenggara negara yang tertinggi dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Anggota DPD dapat mewakili rakyat daerah Provinsi, yang dipilih secara langsung oleh rakyat Provinsi yang bersangkutan pada pemilihan umum (pemilu) legislatif 2004. Hal ini membawa konsekuensi hanya penduduk yang berdomisili yang dapat menjadi calon dan dipilih menjadi anggota DPD. Hak memilih hanya berlaku dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan. Anggota dari setiap Provinsi hanya empat orang ditentukan sesuai dengan luas wilayah provinsi yang bersangkutan dan jumlah penduduk.

DPD sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai tugas yaitu menyerap aspirasi masyarakat di tingkat lokal serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Penyerapan aspirasi dapat diwadahi dengan semacam sekretariat atau "rumah" aspirasi. Proses ini juga perlu melibatkan jaringan formal dengan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹⁰

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini memfokuskan kepada Optimalisasi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah.

¹⁰*Kompas*, Oktober 2004, 53.

2. Subfokus Penelitian

Adapun yang menjadi subfokus dari penelitian ini adalah dengan pendekatan analisis *fiqh siyasah* terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah?
2. Bagaimana Analisis Hukum Positif dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah.
2. Untuk Mengetahui Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Aspirasi Daerah.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai bahan bacaan oleh mahasiswa dan kalangan masyarakat terhadap Lembaga penampung aspirasi daerah.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi yang lebih baik bagi Dewan Perwakilan Daerah dan para Dewan Perwakilan lain yang berada di Provinsi Lampung.

- c. Memberikan sedikit pemikiran mengenai Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga penampung aspirasi daerah.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini sebagai syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung oleh peneliti.
 - b. Supaya dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian dengan fokus Dewan Perwakilan Daerah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh Muhammad Tajam Teguh (2019) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sumber Daya Alam”, menjelaskan tentang Peran Pengawasan DPD RI Terhadap Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Alam dari Tahun 2009-2017 Adapun faktor kesamaan dan pembeda yaitu:
 - a. Persamaannya ialah sama-sama menjadikan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai objek penelitian
 - b. Perbedaan antara penelitian di atas dan penelitian peneliti adalah Penelitian Muhammad Tajam Teguh memfokuskan pada Peran Lembaga DPD RI dalam bidang sumber daya alam sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Peran Lembaga DPD di Proinsi Lampung dalam segala aspek.
2. Skripsi oleh Robby Akbar Zaletti (2020) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru yang berjudul “Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”, menjelaskan tentang Peran Lembaga

DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.¹¹ Adapun faktor kesamaan dan pembeda yaitu:

- a. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
 - b. Pembeda antara penelitian di atas dan penelitian peneliti adalah Penelitian Robby Akbar Zaletti memfokuskan pada Peran Lembaga DPD RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia sedangkan pada penelitian ini berfokus pada Peran Lembaga DPD di Proinsi Lampung
3. Jurnal oleh Robinsar Marbun dan Muhammad Helmi Fahrozi (2021) Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Pertimbangan Dan Pengawasan DPD Ri Berdasarkan Uud Nri Tahun 1945”, menjelaskan tentang fungsi pertimbangan dan fungsi pengawasan DPD yang diatur oleh UUD NRI Tahun 1945. Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yaitu:
- a. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang pengoptimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Daerah
 - b. Perbedaan mengenai penelitian Robinsar Marbun dan Muhammad Helmi Fahrozi. membahas mengenai pengoptimalan fungsi DPD di bidang pertimbangan dan pengawasan sedangkan penulis membahas tentang mengenai pengoptimalan fungsi DPD di bidang legislasi .
4. Tesis oleh Eka Cahya Wardhani (2021) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul “Analisis Eksistensi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 22 D Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”, menjelaskan mengenai Eksistensi DPD Dalam Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945.

¹¹ Robby Akbar Zaletti, “ Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Dalam Sistem Tata Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah” (Pekanbaru, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020).

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian yaitu:

- a. Persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan peran DPD sebagai Lembaga Negara.
- b. Perbedaan antara penelitian Eka Cahya Wardhani ialah penelitian Eka berfokus oleh eksistensi kewenangan dewan perwakilan daerah terhadap amandemen Undang-Undang dasar republik indonesia 1945 Pasal 22 D, sedangkan penelitian ini berfokus pada eksistensi kewenangan dewan perwakilan daerah terhadap proinsi Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar mempermudah hasil penelitian yang komperhensif dan dapat dipertanggung jawabkan. Serta untuk menghimpun data-data yang diperlukan untuk penelitian ini, penggunaan metode oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan Metode Kualitatif, Penelitian Kualitatif dipilih karena ingin mengeksplorasi, menggambarkan dan mendeskripsikan dengan jelas suatu permasalahan oleh peneliti. Jenis Penelitian yang dipilih yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang ditinjau langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data primer, dalam hal ini data primer di peroleh dari staff pemerintah daerah propinsi Lampung.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis, Deskriptif Analisis berfungsi mendeskripsikan dan menggambarkan objek yang diteliti melalui data yang diambil dari sumber yang dipilih.

2. Data dan Sumber Data

a. Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder, Data primer adalah yang data diperoleh secara langsung dari informan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan serta menggunakan Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan informan adalah orang-orang yang paham atau terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku referensi, jurnal serta literatur-literatur, skripsi, artikel hingga pendapat dari para ahli atau sumber data yang relevan dengan penelitian ini guna melengkapi penelitian ini.

b. Sumber Data

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah hasil wawancara peneliti dengan objek penelitian yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Provinsi Lampung, serta wawancara dengan masyarakat yang terlibat. Sedangkan sumber data sekunder pada penelitian ini yaitu berupa teori-teori yang relevan yang peneliti kumpulkan berdasarkan media seperti buku, jurnal, dan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan masalah kepada narasumber secara langsung maupun tidak langsung, supaya mendapatkan jawaban yang kongkret. Adapun yang di lampirkan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Masyarakat

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi dan sebagainya. Selain itu, juga menggunakan studi kepustakaan yang tujuannya mempelajari berbagai

referensi literatur yang mempunyai relevansinya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

4. Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam Sugiyono. Alasan menggunakan teknik *purposive sampling* ini karena sesuai untuk digunakan untuk penelitian kuantitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi menurut Sugiyono.

Menurut Sugiyono metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 3 staff DPD Provinsi Lampung, 3 masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan 3 masyarakat yang tidak menyampaikan aspirasi daerah. Alasan menggunakan seluruh populasi menjadi sampel adalah dikarenakan mewakili seluruh populasi karena jika kurang dari 100 populasi, maka dijadikan sampel penelitian semuanya, oleh karena itu peneliti mengambil 9 sampel yang diambil dari seluruh populasi.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Supaya menghindari kesalahan dalam mengumpulkan data dibutuhkan metode pemeriksaan data dengan cara memeriksa atau mengoreksi data-data yang sudah terkumpul apakah sudah relevan atau belum dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Metode ini dilakukan dengan menyusun ulang data secara teratur dan logis serta sistematis agar mudah dipahami.

c. Sistematis Data (*Systematizing*)

Teknik pengolahan data ini dilakukan dengan cara menempatkan data yang diperoleh dan diklasifikasi secara sistematis berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif atau disebut juga data naratif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara detil dengan uraian yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Dalam penulisan skripsi penulis menganalisis data berdasarkan literatur literatur yang ada dan berkaitan dengan tema judul skripsi ini.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Studi Kasus Dewan Perwakilan Daerah Lampung disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I : Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka teoritik dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tentang kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul penelitian, yaitu : Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Studi Kasus Dewan Perwakilan daerah Lampung.

Bab III : Tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objekserta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab IV : Membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai Analisis *Fiqh Siyasah* terhadap Optimalisasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Studi Kasus Dewan Perwakilan Daerah Lampung.

Bab V : Sebagai penutup yang membahas simpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan pemaparan yang sudah dilakukan di atas serta hasil dari penelitian mengenai judul Analisis Hukum Positif Dan *Fiqh Siyasah* Terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah (Studi Kasus Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Lampung). Maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Propinsi Lampung, merupakan bentuk representatif dari *Ahlalhal liwal aqd* yang merupakan tokoh lembaga legislatif dalam pandangan *fiqh siyasah dusturiyah*, yang mana memiliki tugas dan wewenang yang sama dalam menjalankan roda kenegaraan untuk kemaslahatan masyarakat.
2. Tinjauan hukum positif terhadap Optimalisasi Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Lembaga Penampung Aspirasi Daerah Propinsi Lampung, regulasi terkait lembaga DPD harus lebih di pertegas dan diperjelas untuk dapat mengoptimalkan kinerja dari DPD tersebut. Dengan lemahnya kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembuatan Undang-Undang, dapat menimbulkan akibat yang kurang menguntungkan bagi daerah-daerah, sebab keterbatasan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembuatan Undang-Undang yang mana sebatas hanya dalam menunjukkan rancangan Undang-Undang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang untuk dibahas dan disetujui bersama presiden, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) hanya ikut memberikan dan menunjukkan rancangan Undang-Undang tersebut tetapi tidak ikut menyetujui rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pemaparan simpulan di atas, maka peneliti akan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah pusat, perlu adanya pembenahan terkait regulasi mengenai fungsi, wewenang, hak, dan alat kelengkapan lembaga DPD, agar terciptanya optimalisasi kinerja yang jelas dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Bagi jajaran Dewan Perwakilan Daerah khususnya Propinsi Lampung perlu tingkatkan kinerja dengan cara yang kreatif, menyediakan media yang mudah dijangkau untuk menyalurkan aspirasi, melakukan sosialisasi rutin diberbagai daerah serta memperkuat integritas.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Wahab Khallaf. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Abu Nash Al Faraby. *As Siyâsah Al Madaniyah, Tahqiq Dan Syarah 'Ali Bu Milham*. Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994.
- A.Djazuli. *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Andika. Masyarakat Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- Anwar Rahman. Masyarakat Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- Dayat. Masyarakat Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- Dekantara, S.H, Putra. “Optimalisasi Fungsi Legislasi DPD dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia.” Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Efendi. Masyarakat Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- E.M. Nirahua, Salmon. “Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Fakultas Hukum Universitas Pattimura* 18 (Oktober 2011).
- Faisal Sulaiman, King. *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Gino. Kepala Kantor DPD Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- Hilman Pahlawan, Regy. “Jurnal Civic Hukum” 4, Nomor 2 (November 2019): 147–54.
- “<https://lampung.dpd.go.id/>,” t.t. Diakses 10 November 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa, Konstektualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

- Irawati, Diyah Tri. "Strategi Optimalisasi Pengelolaan Aspirasi Masyarakat Dan Daerah Melalui Kolaborasi Dan Sinergitas Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI." *Journal Of Public Policy And Applied Administration* 1, no. 1 (Maret 2019).
- Kadri, Wahijul, dan Urul Hidayah Tumadi. "Siyasah, Syariyah & Fiqih Siyasah." *Jurnal Hukum Tata Negara* 5 (Desember 2022).
- Kompas*. Oktober 2004.
- Lenny M.L, Sipangkar. "Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (Strengthening The Legislative Function Of Regional Representative Council)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 3 (September 2016).
- Mahendra, Oka. *Mengungkap Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan*. Jakarta: Pustaka Sinar, 1996.
- Muhamad Nasarudin, Tubagus. "Peran DPD sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen)." *Lampung University* 10, no. 1 (Maret 2016).
- Muhammad Al Fatah Akbar. Kasubbag Protokol DPD Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- Mustika, Rindy, dan Hervin Yoki Pradikta. "Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 14–33. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11368>.
- Mustofa. Masyarakat Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- Nirahua, Salmon E.M. "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Hukum* 18 (Oktober 2011).
- Prima Pena, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press, 2015.

- S, Kartika, Deni Yolanda, dan Helma Maraliza. "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 60–73. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11006>.
- Siringoringo, Hotniar. *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Syahbudi Dalimunthe, Hakim. "Peranan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta." 2007.
- Syahril Rozi. Kasubbag Kepegawaian DPD Lampung, Wawancara, Oktober 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1993.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*. Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977.
- Wahbah, Zuhaily. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Wasti, Ryan Muthiara. "Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 4 (2017).
- Widarta. *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Papers Pustaka Utama, 2001.
- Yulida. Masyarakat Lampung, Wawancara, Oktober 2023.

